

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Sistem malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur memberikan perlindungan menyeluruh kepada orang Jawa melalui empat cara: bantuan ekonomi berupa akses tanah dan pinjaman modal, perlindungan budaya yang membolehkan mereka tetap menjalankan tradisi Jawa, bantuan tenaga dari seluruh anggota kaum saat ada acara penting, dan dukungan emosional melalui sistem "ibu angkat". Semua bentuk perlindungan ini didasari nilai-nilai adat Minangkabau yang mengutamakan persaudaraan dan saling membantu, sehingga orang Jawa yang malakok benar-benar diterima sebagai keluarga dengan hak dan kewajiban yang setara.

Nilai-nilai adat Minangkabau menjadi dasar kuat dalam melindungi orang Jawa yang malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur. Nilai "suku badunsanak" mengajarkan bahwa semua orang adalah saudara tanpa memandang asal usul, sehingga orang Jawa yang malakok diberi gelar adat dan hak yang sama dalam musyawarah. Nilai "alam takambang jadi guru" mengajarkan untuk belajar dari alam tentang hidup bersama dan saling membantu, seperti halnya makhluk hidup di alam yang saling mendukung. Nilai "mamak-kamanakan" memperluas konsep keluarga tidak hanya berdasarkan hubungan darah tapi juga melalui ikatan adat. Terakhir, nilai "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" menghubungkan kewajiban melindungi orang lain dengan ajaran agama Islam yang sama-sama dianut kedua kaum. Dengan nilai-nilai ini, orang Jawa yang malakok mendapat perlindungan penuh dan dianggap sebagai "anak kemenakan" sejati dalam masyarakat Minangkabau.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan kaum terhadap orang Jawa yang malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur, ditemukan adanya sistem perlindungan yang komprehensif dan terstruktur, meliputi perlindungan status dan pengakuan adat, perlindungan sosial kemasyarakatan, perlindungan ekonomi dan materil, serta perlindungan hukum adat. Penelitian ini juga mengungkapkan peran aktif pimpinan kaum dan warga suku dalam proses penyelesaian masalah melalui mekanisme yang berjenjang dan sistematis. Berdasarkan temuan tersebut, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Saran akademik: Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan kajian akademik yang lebih mendalam tentang sistem perlindungan adat terhadap pendatang dalam konteks masyarakat multikultural. Perlu dikembangkan kerangka teoretis yang lebih komprehensif untuk menganalisis proses integrasi sosial antara pendatang dengan masyarakat adat, khususnya dalam konteks adaptasi sistem kekerabatan yang berbeda (patrilineal-matrilineal). Lembaga pendidikan tinggi juga perlu mempertimbangkan untuk memasukkan kajian tentang sistem perlindungan adat ini ke dalam kurikulum studi sosiologi dan antropologi, mengingat relevansinya dengan isu-isu kontemporer tentang migrasi dan integrasi sosial.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya: Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi aspek-aspek yang belum terjangkau dalam penelitian ini, seperti dampak jangka panjang sistem malakok terhadap perubahan struktur sosial masyarakat Minangkabau, perbandingan sistem perlindungan adat di berbagai daerah di Sumatera Barat, serta pengaruh modernisasi terhadap keberlanjutan sistem malakok.

3. Saran Praktis: Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem perlindungan kaum terhadap orang Jawa yang malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur, beberapa saran praktis dapat diterapkan untuk memperkuat dan mengembangkan sistem ini. Pertama, pemerintah daerah perlu mendokumentasikan secara resmi praktik-praktik terbaik dari sistem malakok ini sebagai model integrasi sosial yang dapat diadopsi oleh nagari-nagari lain di Sumatera Barat, terutama dalam hal mekanisme pemberian akses ekonomi dan sistem perlindungan sosial berbasis adat. Kedua, perlu dibentuk program pelatihan khusus bagi pemuda dan generasi muda tentang nilai-nilai adat yang mendasari sistem malakok agar tradisi ini dapat berkelanjutan dan tidak hilang seiring perkembangan zaman. Ketiga, sistem bantuan ekonomi seperti "pith pangka" dan jaringan pemasaran kolektif dapat dikembangkan menjadi koperasi resmi yang didukung pemerintah untuk memberikan jaminan legal dan akses permodalan yang lebih besar.

